

UPAYA SOEHARTO MEMOTONG PILAR-PILAR KEKUASAAN SOEKARNO

Syabuddin

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Taman Siswa Bima
syabuddin41201@gmail.com

ABSTRAK

Paska proklamasi kemerdekaan Indonesia dihadapkan pada masalah-masalah yang besar. Bangsa Indonesia harus berhadapan dengan Belanda dalam revolusi fisik tahun 1945-1950. Indonesia yang baru merdeka juga dihadapkan dengan masalah dalam negeri; perekonomian dengan inflasi yang besar, masalah politik dan disintegrasi bangsa. Kemelut politik 1959 mendorong Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 dan era Demokrasi Terpimpin dimulai. Demorasi terpimpin merupakan upaya Soekarno menghimpun kekuatan Nasionalis, Agama dan Komunisme (Nasakom). Konsep Nasakom mendapat sambutan yang baik dari PKI karena memberikan ruang kepada mereka untuk berkembang. Paska Gerakan 30 September 1965 terjadi perubahan konstelasi politik. Soeharto menghancurkan Partai Komunis Indonesia sebagai pilar penting kekuasaan Soekarno, maka pertarungan politik nasional saat itu berpusat pada Soekarno dan Soeharto. Soeharto kemudian naik ke panggung kekuasaan nasional setelah menghancurkan pilar-pilar lainnya seperti menangkap para menteri yang terlibat dalam Gerakan 30 September, membersihkan tentara yang terlibat atau dipandang Soekarno dan membersihkan MPRS/DPR-GR yang kelak mengangkatnya menjadi presiden.

Kata kunci: Soeharto, Soekarno, Pilar Kekuasaan.

PENDAHULUAN

Kancah kehidupan politik di Indonesia sejak masa kerajaan diwarnai munculnya beberapa tokoh yang kemudian naik ke permukaan sebagai pemimpin. Kehadiran beberapa tokoh ini menarik dicermati, misalnya, Kertanegara dengan gelar Siwabudha yang menjadi raja Singosari sejak tahun 1266-1292. Singosari runtuh oleh serangan Jaya Katwang pada tahun 1292. Kertanegara diserang dikala sedang menikmati minuman keras dan wafat sedangkan patihnya yang memberikan perlawanan kemudian meninggal di Manguntur (Purwadi, 2007:52). Kekuasaan Jaya Katwang kemudian dihancurkan oleh serangan gabungan tentara Tartar dan Majapahit.

Manusia lahir dan mati, negeri timbul dan tenggelam demikian juga memasuki lembaran sejarah Indonesia kontemporer. Soekarno yang menjabat presiden pertama Indonesia (1945-1966). Dalam sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dan melantik Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden

Berbagai jorgan politik dan ekonomi dicanangkan Manipol-Usdek, Nasakom, Marhaenis, Revolusi belum selesai, Trisaktiyang kesemuanya dalam rangka mempertahankan kekuasaan itu sendiri.

Paska peristiwa Gerakan 30 September 1965, konstelasi politik di Jakarta khususnya dan Indonesia mulai berubah. Salah satu tokoh yang baru muncul di permukaan dan menarik perhatian penulis adalah Mayjend. Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Setelah mendapat kekuasaan baru lewat Supersemar, Soeharto mulai menghancurkan “pilar-pilar” kekuasaan Soekarno terutama dengan membubarkan dan menghancurkan PKI. Hal dapat terjadi karena menurut teori kekuasaan Max Weber bahwa kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya (Maran, 2001:190).

Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengkajinya dalam sebuah tulisan yang berjudul; Upaya Soeharto Memotong Pilar-Pilar

Kekuasaan Soekarno. Kiprah Soeharto di atas panggung politik Nasional merupakan hal yang menarik untuk disimak. Soeharto merupakan tokoh yang amat penting selama abad 20 di Asia (Elson, 2001:vii).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian sejarah sehingga metode yang digunakan adalah metode sejarah. Gottschalk (1985:32) menjelaskan metode sejarah adalah proses menguji, menganalisis sertaperbandingan secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau sedangkan rekonstruksi dengan menempuh proses *historiografi* atau penulisan sejarah. Sulasman (2014:90-91) menjelaskan metode sejarah mencakup empat langkah yaitu *heuristic*, *kritik sumber*, *interpretasi* dan *historiografi*. Tahap *heuristic* adalah mengumpulkan data atau sumber sejarah. Sumber sejarah dapat berupa data lisan, tulisan maupun benda. Kaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan data tertulis berupa buku-buku. Buku-buku tersebut antara lain: *Sejarah Indonesia Modern* karangan MC. Ricklefs tahun 2018, *Politik Militer Indonesia 1945-1947*, karangan Ulf Sundhaussen tahun 1986 dan sumber-sumber lain yang relevan dengan obyek penelitian ini.

Tahap kedua adalah kritik sumber atau *verifikasi*. Kritik ini bertujuan untuk memperoleh keabsahan sumber (Abdurrahman, 2007:68). Kritik sumber dibagi dua yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern penulis melakukan kritik siapa yang membawa berita dan menulis sumber mengenai buku yang dijadikan bahan dalam penulisan ini. Kritik intern penulis melakukan kritik terhadap suatu sumber dengan membandingkan isi data atau isi buku sejarah yang telah ditulis pengarang tersebut. Tahap ketiga adalah *interpretasi* atau penafsiran. *Interpretasi* terdiri dari analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Keduanya dipandang sebagai metode utama di dalam interpretasi (Abdurrahman, 2007:73). Tahap keempat adalah *historiografi* atau penyajian. *Historiografi* dari sudut pandang etimologis berasal dari kata *historia* yang artinya penyelidikan gejala alam

fisik dan *grafein* yang artinya gambaran, lukisan, tulisan dan uraian. Secara harafiah *Historiografi* dapat diartikan sebagai uraian atau tulisan tentang hasil penelitian mengenai gejala alam (Sulasman, 2014:147). Dalam kaitan dengan penelitian ini, penulis akan menyajikan dalam bentuk tulisan secara kronologis sebagai kisah sejarah suatu sintesa yang kausalitas dan komperhensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik. Dimana memandang peristiwa sejarah oleh kejadian politik seperti perang, diplomasi dan tindakan tokoh-tokoh politik (Abdurrahman, 2007: 30). Pendekatan politik untuk menyorot pertarungan politik antara dua tokoh Soekarno dan Soeharto. Soekarno merangkul PKI sebagai menyeimbang Angkatan Darat (AD) sedangkan Soeharto menggunakan tentara AD dan kekuatan massa untuk menghancurkan Soekarno.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latarbelakang Munculnya Soeharto ke Panggung Politik Nasional

Paska proklamasi kemerdekaan, Indonesia dihadapkan dengan berbagai permasalahan besar seperti perjuangan mempertahankan kemerdekaan, perekonomian, dan ancaman disintegrasi bangsa yang ditandai dengan pergolakan di berbagai daerah. Setelah Jepang menyerah, Belanda yang sudah bertahun-tahun lamanya mencengkeram dan menanamkan kekuasaannya di Indonesia tidak dengan suka rela bersedia melepaskan kekuasaan itu (Gie, 129-130). Masa ini dikenal dengan revolusi fisik yaitu perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda baik melalui diplomasi maupun perjuangan dengan senjata. Masalah dalam negeri, dimana terjadi pergantian kabinet yang terus menerus pada masa parlementer yang berlangsung tahun 1945-1959. Tercatat tujuh kali terjadi pergantian kabinet, ini berarti umur rata-rata berkisar lebih kurang 15 bulan saja, namun ada yang mampu bertahan sampai dua tahun. Demokrasi parlementer ternyata tidak cocok dengan dengan kepribadian bangsa. Bagi Soekarno, Demokrasi Parlementer yang dipakai bangsa Indonesia merupakan produk impor yang

tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat kita dandemokrasi tersebut tidak menjiwai cita-cita bangsa Indonesia (Soerojo, 1988:127). Menurut Soekarno, syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah dengan mewujudkan dasar permusyawaratan dan perwakilan yang menjadi asas dari Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin

Menghadapi situasi politik tersebut, Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit tersebut mengubah tatanan kenegaraan dan politik yang telah terbentuk sebelumnya yaitu Parleментар menuju Demokrasi Terpimpin. menurut Soekarno, demokrasi terpimpin bukanlah diktator kaum proletar demokrasi atau menurut istilah undang-undang dasar 1945 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” (Soekarno, 2001:90). Perubahan politik di Indonesia pada masaitu bukan mendirikan kekuatan segolonganatasan saja juga tidak mendirikan kekuasaan diktatorial kaum proletar, tapi harus mendirikan kekuasaan gotong-royong, kekuasaan menerapkan demokrasi yang menjamin terkonsentrasinya seluruh kekuatan nasional, seluruh kekuatan rakyat (Abdulgani, 1961:149).

Satu hal mendasar yang membedakan antara sistem demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin adalah kekuasaan Presiden. Dalam Demokrasi Liberal, parlemen memiliki kewenangan yang terbesar terhadap pemerintahan dan pengambilan keputusan negara. Sebaliknya, dalam sistem Demokrasi Terpimpin presiden memiliki kekuasaan hampir seluruh bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin sebagai landasannya Soekarno merumuskan konsepsi Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis), ketiganya menjadi kekuatan presiden dalam mempertahankan kekuasaannya. Melalui Demokrasi Terpimpin, presiden Soekarno telah memberikan tempat bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam sistem perpolitikan nasional karena menurut Soekarno, PKI telah terbukti mempunyai basis masa terbesar di Indonesia daripada partai-partai lain. Pada pemilu tahun 1955, Partai Komunis Indonesia

menempati empat besar perolehan suara. Nasakom merupakan perpaduan nasional, agama dan komunisme merupakan suatu sarana menyeimbangkan, mengacaukan serta mengekang kekuatan militer (Angkatan Darat) yang makin besar dan mengancam dengan cara membuka jalan bagi PKI (Elson, 2009: 346). Namun sampai dengan tahun 1960, antara Angkatan Darat dan Presiden Soekarno disebut sebagai hubungan “konflik yang stabil” yang ditandai oleh kerjasama, kompetisi dan ketegangan di antara lawan-lawan tanding yang setara (Crouch, 1986:47).

Hubungan antara Soekarno dan PKI selanjutnya merupakan simbiosis, PKI memberikan dukungan lewat MPRS kepada Soekarno sebagai presiden seumur hidup pada bulan Mei 1963 sedangkan Soekarno memberikan jalan bagi PKI untuk membentuk angkatan ke-V. Suasana antagonis inilah yang terdapat di tanah air Indonesia menjelang pemberontakan Gerakan 30 September 1965 (Notosusanto, 1995:26). Namun menurut Leanne S. Mint, sikap PKI seperti itu dikarenakan PKI belum kuat untuk menentang presiden akan tetapi para pemimpin partai lain dan musuh-musuh menyadari fakta bahwa dengan seluruh cabang-cabangnya mengontrol dukungan massa yang terbesar dan terorganisir rapi di tanah air (Mint, 2002:283). Berdasarkan pendapat di atas maka PKI akan mengambil alih kekuasaan pemerintah pada saat mereka memiliki sumber daya yang cukup.

Partai Komunis Indonesia mulai melancarkan aksi-aksi sepihak, yakni tindakan-tindakan illegal oleh anggota-anggota organisasi massanya seperti BTI untuk menguasai tanah yang bukan haknya. PKI pula melancarkan pula dengan apa yang dinamakan *ofensif revolusioner*, dengan jalan menyerang secara pribadi, *character assassination* pihak-pihak yang dianggap sebagai lawannya melalui media massa, demonstrasi, poster-poster dan alat-alat agitasi propaganda lainnya (Notosusanto, 1995:25-2). Aksi-aksi PKI di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali pada tahun 1963, PKI secara agresif dengan ormas-ormasnya terutama Barisan Tani Indonesia (BTI)

dan Pemuda Rakyat melakukan kampanye aksi sepihak. PKI menjalankan *Landreform* dengan cara menguasai tanah-tanah pertanian yang melanggar UU Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 untuk dibagikan kepada petani penggarap dan melaksanakan Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH). Hal ini memberikan legitimasi bagi PKI untuk melakukan teror dan pembunuhan diperbagai daerah sehingga menimbulkan ketakutan

Posisi PKI semakin kuat dengan dibentuknya kabinet Dwikora pada tanggal 27 Agustus 1964, yang didalamnya duduk beberapa tokoh PKI sebagai menteri. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena menurut William Abenstein dan Edwin Fogelman, ada tiga cara klasik yang dipergunakan untuk mendapatkan kekuasaan sebagai berikut: (1) Mereka menyatakan diri dalam propaganda sebagai partai milik rakyat yang mengabdikan pada kebebasan demokrasi, keadilan sosial dan menentang semua bentuk reaksi serta ketidakadilan sosial; (2) mengadakan infiltrasi atau penyusupan ke dalam partai politik, serikat buruh, dewan tentara dan pemerintah daerah; (3) kekerasan atau kudeta (Abenstein dkk., 1990:28).

Gerakan 30 September 1965

Kemelut politik di atas mencapai puncak pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dengan dilancarkan Gerakan 30 September 1965. Secara fisik-militer gerakan akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Bataliyon I Resimen Cakrabirawa (sekarang Paspampres) selaku pimpinan formal seluruh gerakan. Mereka mulai bergerak pada tanggal 1 Oktober 1965 yang didahului dengan gerakan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Kesemuanya dibawa ke sebuah desa Lubang Buaya sebelah Selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusumah Jakarta. Secara kejam mereka dianiaya dan akhorna dibunuh oleh anggota-anggota Pemuda Rakyat, Gerwani dan lain-lain organisasi setelit PKI. Setelah puas dengan kekejamannya, semua jenazah dimasukan ke dalam sebuah sumur tua lalu ditimbun sampah dan tanah (Poespanegoro dkk., 1992:389-340).

Melalui siaran RRI yang mereka kuasai, Untung menyiarkan tujuan gerakannya yaitu untuk melindungi presiden Soekarno dari suatu kudeta yang direncanakan oleh suatu dewan yang terdiri dari jenderal-jenderal Jakarta yang korup dan menikmati penghasilan tinggi yang menjadi kaki tangan Neokolim. Namun pada siaran radio jam 11.00, Untung menyiarkan tentang Dewan Revolusi yang telah mengambil alih seluruh kekuasaan negara dan kabinet yang telah demisioner. Sedangkan pada siaran jam 14.00, Untung menyiarkan susunan Dewan Revolusi. Keseluruhan anggota yang tercantum dalam susunan Dewan Revolusi Keputusan No. 1 berjumlah 45 orang (Komando Operasi Tertinggi, 1965:148). Susunan Dewan Revolusi tersebut tidak mencantumkan nama Soekarno.

Dukungan terhadap gerakan tersebut datang dari Oemar Dhani selaku Panglima Angkatan Udara. Angkatan Udara telah dan selalu mendukung seluruh gerakan yang progresif revolusioner (Crouch, 1986:109). Dukungan dari Jawa Tengah datang dari Kolonel Sahirman yang disiarkan melalui RRI Semarang pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 13.00 menyatakan dukungannya terhadap Gerakan 30 September dan dibentuknya Dewan Revolusi Daerah Jawa Tengah dan ia sendiri yang akan memimpin Dewan Revolusi Jawa Tengah. Pengumuman itu kemudian disusul dengan Keputusan No.1 yang menyatakan bahwa ia mengangkat Letkol. Inf. Usman Sastrodibroto sebagai pimpinan Kodam VII/Diponegoro. Dukungan dari Jawa Timur datang dari Rustomo dengan pengumuman melalui RRI Surabaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Dukungan pula datang dari daerah-daerah lain seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bali disaat Gerakan 30 September di Jakarta sudah dinyatakan gagal.

Paska meninggal Yani, Soeharto karir militer dan politik Soeharto semakin bersinar, secara *de facto* Soeharto telah menguasai AD. Soeharto kemudian memberlakukan keadaan darurat dan menghubungi panglima angkatan lainnya seperti Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya R.E. Martadinata, Panglima Angkatan Kepolisian Jenderal (Pol) Soetjipto Judodiharjo, dan Deputi Operasi Angkatan Udara Kommodor Leo

Wattimena. Melalui telepon, Soeharto memberi tahu bahwa untuk sementara pimpinan Angkatan Darat dipegang olehnya dan meminta kepada mereka untuk tidak menggerakkan pasukan tanpa sepengetahuan Panglima Kostrad.

Operasi penumpasan Gerakan 30 September 1965 mulai dilakukan dengan mengambil langkah pertama yaitu menetralsir pasukan-pasukan yang ada di sekitar Medan Merdeka yang dipergunakan oleh kaum pemberontak. Pasukan dari Batalyon 530 Brawijaya berhasil diinsafkan namun batalyon 545/Diponegoro berhasil ditarik oleh Gerakan 30 September 1965 ke wilayah Halim Perdanakusumah. Sasaran selanjutnya adalah Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah. Melalui kurirnya, Soeharto meminta kepada Soekarno agar meninggalkan Halim karena pasukannya akan menyerang pangkalan udara dan membersihkan seluruh kekuatan Gerakan 30 September. Soekarno kemudian meninggalkan Halim menuju istana Bogor. Pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 06.10 Pangkalan Udara Halim telah berhasil dikuasai oleh RPKAD (Komando Operasi Tertinggi, 1965:7).

Surat Perintah 11 Maret

Situasi politik yang kacau balau akibat Gerakan 30 September 1965 ditambah lagi keadaan ekonomi dimana laju inflasi pada tahun 1966 mencapai angka 660% (Wanandi, 2014:59). Menghadapi kesulitan perekonomian pemerintah padatanggal 13 Desember 1965 melakukan devaluasi uang rupiah, akibatnya nilairupiah merosot tajam dan harga kebutuhan pokok melonjak naik di pasaran. Hal ini menimbulkan gelombang demonstran itu terdiri dari KAPPI, KAMI, KAPI kemudian muncul juga KABI dari kalangan Buruh, KASI (Sarjana), KAWI (Wanita), KAGI (Guru).

Pada tanggal 6 Oktober 1965 dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Bogor ditetapkan Kebijakan Presiden Soekarno mengenai Penyelesaian G-30 S/PKI. Presiden menggariskan kebijakan: *“Bahwa aspek-aspek Gerakan 30 September akan diselesaikan sendiri oleh Presiden; aspek militer administratif diserahkan penyelesaiannya kepada Mayor Jendral Pranoto, Pelaksanaan Tugas sehari-hari Men/Pangad,*

sedangkan penyelesaian aspek militer teknis masalah keamanan dan ketertiban diserahkan kepada Mayor Jendral Soeharto” (Sekretariat Negara, 1980: 51).

Para demonstran menuntut penyelesaian masalah ini secepatnya namun sampai dengan terbentuknya Front Pancasila tanggal 26 Oktober 1965 presiden Soekarno belum memenuhi tuntutan itu. Front Pancasila kemudian pada tanggal 12 Januari 1966 mendatangi DPR-GR mengajukan tuntutan yang disebut Tritura (Tri Tuntutan Rakyat): Pembubaran PKI, Pembersihan kabinet dari unsur-unsur gerakan 30 September dan perbaikan ekonomi/penurunan harga barang.

Suasana di Jakarta masih tidak menentu dan ketegangan masih terjadi dimana-mana karena pemimpin PKI masih menduduki jabatan di kabinet dan secara resmi. Memang sudah lama TNI AD menghendaki agar Presiden Soekarno melarang secara resmi PKI dan memberhentikan menteri-menterinya yang bergaris kiri, seperti Subandrio. Pada saat yang bersamaan, TNI AD juga menyadari ketidaktunggalannya untuk berhadapan frontal secara langsung dengan Soekarno (Kasenda, 1991: 169). Jika TNI AD berhadapan langsung dengan Soekarno maka akan menimbulkan perlawanan yang semakin banyak dari para pendukung Soekarno, seperti TNI AU, AL, kepolisian, pasukan kawal presiden, dan para pendukung Soekarno. Masih ditambah lagi dukungan Soekarno dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh sebab itu, Sarwo Edhie bersama tentara RPKAD berusaha menekan Soekarno dengan cara memanfaatkan para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi KAMI.

Pada tanggal 10 Maret 1966 presiden Soekarno mengumpulkan beberapa elemen masyarakat yang bergabung dalam partai politik dan ormas agar mengutuk Tritura. Permintaan tersebut tentu saja ditolak oleh Front Pancasila sehingga pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil terutama yang berkaitan dengan pembubaran PKI. Sehingga pada keesokan harinya kabinet mengadakan sidang paripurna untuk membahas krisis yang memuncak. Sidang diboikot oleh demonstran dengan melakukan pengempesan ban mobil sepanjang jalan yang

menuju istana tempat sidang kabinet berlangsung. Sewaktu Presiden berpidato dia diberi tahu oleh Brigadir Jenderal Subur (Cakrabirawa) bahwa di luar istana ada pasukan tanpa tanda pengenal pada seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Mayor Jenderal Amir Machmud selaku Panglima Kodam V/Jaya namun Presiden meninggalkan sidang dan menyerahkan pimpinan sidang kepada J. Leimena. Presiden kemudian menuju istana Bogor bersama Waperdam I Dr. Subandrio, Waperdam III Dr. Chaerul Saleh. Kemudian J. Leimena menutup sidang tersebut kemudian meninggalkan Jakarta dengan mobil menyusul Presiden Soekarno menuju istana Bogor.

Soekarno disusul oleh Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Mayor Jenderal M. Yusuf dan Mayor Jenderal Amir Machmud atas perintah Jenderal Soeharto selaku Menteri/ Pangad. Motivasinya adalah agar presiden tidak merasa terpengaruh dan supaya yakin bahwa angkatan darat tetap siap sedia asalkan diberi kepercayaan penuh. Sebelum berangkat ketiga Jenderal itu menanyakan pesan untuk Presiden. Jenderal Soeharto menjawab "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya, beliau akan mengerti" (Poespanegoro, dkk, 1992, 412). Latar belakang ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah meletusnya Gerakan 30 September 1965 antara Soekarno dan Soeharto terdapat perbedaan kunci bagi usaha meredakan ketegangan. Menurut Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan berhenti sebelum rasa keadilan rakyat terpenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan. Sebaliknya Soekarno tidak mungkin membubarkan PKI karena bertentangan dengan Dokrin Nasakom yang telah dicanangkan keseluruh dunia.

Namun pada pertemuan selanjutnya Jenderal Soeharto menyatakan bersedia menjadi bempere dalam membubarkan PKI untuk meredakan pergolakan, asal diberi kebebasan bertindak oleh presiden. Pesan Mayjen. Soeharto yang disampaikan kepada tiga perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor itu pada dasarnya berkaitan dengan kesanggupan tersebut

(Sekretaris Negara Republik Indonesia, 1994:139).

Presiden di dampingi oleh tiga dari empat orang Wakil Perdana Menteri yaitu Subandrio, Chaerul Saleh, Leimena dan salah seorang dari isterinya yaitu Hartini. Putusan yang dihasilkan dalam pertemuan itu adalah Surat Perintah 11 Maret 1965 (Supersemar). Dimana di dalamnya Presiden memerintahkan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggapnya perlu untuk menjamin keamanan, ketenangan, stabilitas pemerintahan dan revolusi, serta juga menjamin keselamatan pribadi serta kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi kesatuan Republik Indonesia dan untuk meneruskan segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi (Crouch, 1986:209). Walaupun Supersemar bukan berarti peralihan kekuasaan namun secara *de facto*, Soeharto membubarkan PKI dan membubarkan kabinet Dwikora.

Kedudukan Soeharto makin kuat setelah MPRS mengadakan Sidang Umum ke IV padatanggal 20 Juni 1966. Salah satu ketetapan penting adalah, TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris MPRS RI, yang berisi mengukuhkan adanya Surat Perintah Sebelas Maret tersebut. Dengan demikian Soekarno tidak dapat mencabut kembali Supersemar dan memberikan landasan yang kuat kepada Soeharto untuk melakukan kegiatan kenegaraan.

Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden Soekarno menyampaikan Pelengkap Nawaksara di hadapan pimpinan MPRS. Dan, dalam musyawarah tanggal 21 Januari 1967 MPRS menyatakan bahwa presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan konstitusi sehingga pada tanggal 9 Pebruari 1967 mengeluarkan resolusi bahwa apa yang dilakukan oleh presiden dapat membahayakan negara. Oleh karena itu MPRS harus mengadakan sidang Istimewa untuk memberhentikan Soekarno dari jabatan presiden dan memerintahkan kepada Kehakiman untuk

mengadakan pengusutan, pemeriksaan dan penuntutan secara hukum (Joeniarso, 1990:131).

Memotong Pilar-Pilar Kekuasaan Soekarno Membubarkan PKI

Sikap Soekarno tetap tidak mau membubarkan Partai Komunis Indonesia dan tetap menolak ketetapan MPRS dan penjabarannya. Hal ini menyebabkan Soeharto dan Nasution serta didukung oleh angkatan lainnya kecuali Angkatan Udara sampai pada kesimpulan bahwa presiden tidak mau menyesuaikan dengan kondisi yang memerlukan kebijakan baru.

Soeharto tidak secara terbuka mengeluarkan perintah kepada panglima-panglima daerah untuk menahan pimpinan-pimpinan Partai Komunis Indonesia dan membubarkannya. Soeharto tidak mengirimkan perintah resmi dan tertulis kepada panglima-panglima daerahnya untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia, tetapi melalui pesan bahwa Partai Komunis Indonesia harus dihancurkan. Oleh karena itu para panglima daerah memberikan reaksi yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Di Jakarta, sampai dengan 16 Oktober, sudah 1.334 orang yang ditahan dengan alasan terlibat PKI (Elson, 2001:239). Pada pertengahan Nopember 1965 jumlah itu meningkat menjadi 2.200 orang.

Daerah-daerah lain seperti Jawa Barat dimana para pejabat militer menciduk para pimpinan dan aktivis Partai Komunis Indonesia sehingga sampai dengan bulan Desember telah ditahan sebanyak 10.000 orang. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Angkatan Darat bergerak lebih cepat dan keras karena basis utama pendukung Partai Komunis Indonesia dan Soekarno. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Bali tidak luput dari penumpasan PKI. Di daerah, Soeharto bergerak dengan hati-hati menindak Partai Komunis Indonesia dengan memanfaatkan kebencian berbagai elemen masyarakat baik dari kalangan nasionalis maupun agama. Pada pertemuan di Jakarta tanggal 9-11 Nopember 1965, Muhammadiyah mengumumkan bahwa pembasmian Gertapu/PKI sama dengan perang sabilillah

(Ricklefs, 2008:595). Tentara juga melatih beladiri agar bisa membantu dalam usaha pembersihan oknum-oknum Gerakan 30 September yang berada dalam instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintahan/pendidikan (Ramadhan, 2014:37). Masyarakat yang terlatih ini juga dilibatkan dalam gerakan penumpasan PKI yang menyebabkan gerakan lebih cepat.

Penangkapan dan pembunuhan terhadap PKI lebih masif setelah dikeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar maka pada tanggal 12 Maret 1966 Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS menandatangani Surat Keputusan Presiden/Pangti/Mandataris MPRS/PBR No.1/3/1966, yaitu membubarkan PKI dan organisasi-organisasi yang bernaung dan berlandung di bawahnya di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Pada bulan Oktober 1966, pembunuhan terjadi di Jawa Tengah, selanjutnya pada bulan November merembet ke Jawa Timur, dan baru pada bulan Desember terjadi di Pulau Bali” (Wardaya, 2006:172). Pembasmian terhadap PKI pada saat itu digambarkan sebagai salah satu pembunuhan massal terburuk sepanjang abad ke-20. Dan, dengan hancurnya PKI maka hancur pula pilar penting kekuasaan Soekarno.

Penangkapan Para Menteri

Menghadapi gelombang aksi masa maka Soekarno mengadakan *reshuffle* kabinet pada tanggal 21 Pebruari 1966 yang diberi nama Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Pada hari pelantikan Kabinet tersebut tanggal 24 Pebruari 1966 terjadi demonstrasi yang memprotes susunan kabinet dimana presiden mengangkat orang-orang yang diragukan untuk menyelesaikan peristiwa Gerakan 30 September seperti Dr. Soebandrio, Ir. Surachman, Oei Tjoe Tat, SH., sedangkan nama Jenderal Nasution disingkirkan.

Soeharto kemudian menahan para menteri yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Tindakan Soeharto ini juga dipicu oleh aksi yang dilakukan oleh Waperdam III Chaerul Saleh membacakan pengumuman tertulis presiden Soekarno pada tanggal, 17 Maret 1966 yang menegaskan bahwa Supersemar

bukan berarti penyerahan kekuasaan Presiden kepada Menpangad. Dampaknya, pada tanggal 18 Maret 1966, Menpangad selaku Komkamtib melakukan penahanan terhadap 15 orang menteri. Kelimabelas menteri itu adalah sebagai berikut: Dr. Soebandrio (Waperdam I, Kompartemen Luar Negeri); Dr. Chaerul Saleh (Waperdam III, Ketua MPRS); Ir. Setiadi Reksoprodo (Menteri urusan Listrik dan Ketenagaan); Sumardjo (Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan); Oei Tjoe Tat, SH. (Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet); Ir. Surachman (Menteri Pengairan Rakyat dan Pembangunan Desa); Yusuf Muda Dalam (Menteri Urusan Bank Sentral, Gubernur Bank Indonesia); Armunanto (Menteri Pertambangan); Sutomo Martopradoto (Menteri Perburuhan); A. Astrawinata, SH. (Menteri Kehakiman); Mayjen. Achmadi (Menteri Penerangan); Drs. Moh. Achadi (Menteri Transmigrasi dan Koperasi); Letkol. Imam Safe'i (Menteri Khusus Urusan Keamanan); J.K. Tamukaka (Menteri Sekretaris Jenderal Front Nasioanal); Mayjen. Dr. Soemarmo (Menteri/Gubernur Jakarta Raya). Salah satu anggota kabinet yang lolos adalah Surachman tetapi akhirnya terbunuh di Blitar Selatan pada tahun 1968. Sedangkan Chaerul Saleh mati di penjara pada tahun 1967 (Ricklefs, 2008:598).

Para menteri itu kemudian diajukan ke pengadilan diawali dengan terdakwa Menteri Menteri Urusan Bank Sentral, Gubernur Bank Indonesia, Yusuf Muda Dalam pada tanggal 30 Agustus 1966 dengan dakwaan melakukan korupsi, subversi, mengacaukan perekonomian, penyelundupan senjata dan mempunyai enam isteri. Menurut Sundhaessen (1968:428), "tidak diragukan lagi bahwa sampai tingkat tertentu Soebandrio setidak-tidaknya telah membantu, pada awal 1965, desas-desus tentang adanya sebuah Dewan Jenderal yang sedang berkomplot untuk menggulingkan pemerintah dan dia bahkan tidak berusaha menutup-nutupi peran yang dimainkannya dalam surat Gilchrist, yang nampaknya telah membantu meyakinkan anggota-anggota persekongkolan kudeta di sekitar Untung, pimpinan PKI".

Pada tanggal 1 Oktober 1966, Subandrio diajukan ke Mahmillub atas tuduhan terlibat dalam kudeta Untung dan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang terlibat setelah bulan Oktober 1965 dan oditur militer menjatuhkan hukuman mati kepada Soebandrio. Hal ini menyebabkan posisi Soekarno mulai goyah. Hal ini tak dapat dipungkiri karena Soebandrio menduduki posisi penting dalam struktur kabinet Dwikora yaitu sebagai Waperdam I dan Kompartemen Luar Negeri serta Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI).

Pengadilan atas Oemar Dhani dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1966, oditur militer mengemukakan bahwa Marsekal Udara itu yang keterlibatannya dalam kudeta Untung hampir-hampir tidak diperdebatkan lagi. Dimana dalam persidangan terungkap bahwa Oemar Dhani telah memberitahukan kepada Presiden sebelum adanya pembunuhan terhadap enam jenderal tentang adanya Gerakan 30 September 1965 yang sudah siap mencegah kudeta yang hendak dilancarkan oleh Dewan Jenderal. Hal ini bertentangan dengan pernyataan tertulis yang disampaikan oleh presiden Soekarno kepada Mahmillub dimana dia menegaskan bahwa kudeta Untung itu diluar dugaannya sama sekali.

Rangkaian sidang-sidang itu merupakan senjata yang ampuh untuk mengikis kekuasaan Soekarno karena setelah sidang-sidang itu berlangsung berbagai elemen masyarakat berkumpul di Bandung Jawa Barat dan menuntut agar presiden dihadapkan pada pengadilan.

Pembersihan juga dilakukan dalam departemen-departemen. Pada tanggal 29 Oktober 1966, Brigjen Syarif Thayeb selaku Menteri Pendidikan Tinggi, menskors anggota akademik maupun administratif yang terlibat PKI ataupun organisasi afiliasi PKI yang ada di lingkungan departemennya (Elson, 2001:243).

Pembersihan Tentara

Di kalangan militer sendiri serangkaian pembersihan dan alih tugas dilaksanakan. Pada tanggal 14 Oktober 1965 Mayjend. Pranoto Reksosamudro ditangkap karena dituduh terlibat dalam Gerakan 30 September (Sularto,

2001:307). Di Jawa Barat yang pandang penting Mayjen. Adjie yang bersikap mendua terhadap perubahan politik terakhir ditugaskan mengikuti kursus-kursus di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) tetapi berhasil menolak. Sehingga perwira-perwira anti Soekarno di Bandung membentuk apa yang dianggap sebagai komando tandingan dan dengan cepat dapat menguasai seluruh divisi. Sehingga tanggal 20 Juli 1966 Mayjen. Adjie secara resmi digantikan oleh Mayjen. Dharsono.

Langkah pembersihan di jajaran Kodam Diponegoro menurut panglima Diponegoro yang baru, Mayor Jenderal Surono, kira-kira 20% dari divisi telah dianggap terlibat dalam gerakan 30 September. Banyak perwira dan prajurit biasa ditahan dan akhirnya kira-kira 1.500 orang dipecat dengan tidak hormat sedangkan 1.100 ditangguhkan kenaikan pangkatnya, dipensiunkan dan dihukum (Crouch, 1986:260). Keadaan yang berbeda dengan divisi Brawijaya Jawa Timur, dimana hanya sedikit perwira yang bersangkutan paut dengan gerakan 30 September 1965, sehingga langkah pembersihan merupakan lanjutan dari kekalahan gerakan tersebut. Hal ini disebabkan karena para Soekarno tidak seperti perwira-perwira di Jawa Tengah, mereka tetap anti komunisme sehingga banyak perwira Brawijaya tetap memegang komando lokal. Akhirnya pembersihan Angkatan Darat terhadap PKI tahun 1965 dan keberhasilannya dalam menurunkan Presiden Soekarno dari kedudukannya, menjadikan Angkatan Darat sebagai kekuatan dominan satu-satunya di atas panggung politik Indonesia (Crouch, 1986:389).

Sedangkan dalam jajaran Angkatan Udara di bawah tekanan Soeharto, Sri Muljono Herlambang digantikan oleh Rusmin Nurjadin yang tidak mempunyai hubungan dekat dengan Soekarno sebagai panglima yang baru. Pengangkatan ini memungkinkan dilaksanakannya pembersihan besar-besaran terhadap Soekarno dalam tubuh Angkatan Udara (Sundhaessen, 1968:412-413). Pada bulan Maret 1966, sebanyak 306 perwira ditahan, termasuk Omar Dhani dan Sri Mulyono Herlambang. Cakrabirawa, pasukan pengaman

presiden sebagai batalion yang terlibat langsung dalam pemberontakan itu dibekukan.

Angkatan Kepolisian termasuk mengalami pembersihan yang lunak dimana dalam pertengahan tahun 1966 sebanyak 713 orang pecat dan sebagian diberhentikan sementara termasuk 2 perwira senior dan 35 perwira menengah. Sebagian besar anggota yang kena pembersihan adalah personil yang berpangkat rendah terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah dimana polisi sering memihak PKI dalam percaturan politik yang berskala kecil.

Pembersihan di tubuh Angkatan Laut baru dimulai sejak tahun 1968 setelah naiknya Laksamana Muda Sodomo menggantikan Muljadi yang dipindahtugaskan menjadi Duta Besar RI untuk Uni Soviet. Hal ini terjadi karena Angkatan Laut dengan tulang punggungnya Korps Marinir (KKO) Letnan Jenderal Hartono dan Panglima Angkatan Laut Muljadi menolak untuk melakukan pembersihan sebesar tuntutan Angkatan Darat.

Setelah naiknya Sudomo, beberapa perwira Angkatan Laut lainnya seperti Puguh mantan Menteri Urusan Maritim, Laksamana Jatidjan dan Kepala Pusat Penerangan Angkatan Laut Komodor Sjamsu Sutjipto dikenakan tahanan rumah.

Perwira-perwira lainnya yang dipandang Soekarno dialihugaskan ke jabatan baru seperti duta besar atau jabatan lainnya yang menguntungkan.

Pembersihan MPRS/DPR-GR

Menyusul penangkapan para menteri yang salah satunya adalah Waperdam III Chaerul Saleh yang juga sebagai Ketua MPRS, pimpinan MPRS segera membersihkan majelis itu dari unsur-unsur Komunis beserta simpatisannya. DPR-GR memecat 36 orang anggotanya dari Partai Komunis Indonesia. Sebagai penggantinya Soeharto menunjuk anggota baru parlemen untuk mengganti anggota yang telah disingkirkan dan menggelar sidang pada bulan Maret 1967 (Ricklefs, 2008:605). Pada sidang tanggal 20 Juni 1966, majelis memilih Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai ketua. Sidang tersebut merupakan kemenangan besar bagi Soeharto dan sebaliknya merosotnya kekuasaan

Soekarno karena dalam sidang selanjutnya pada tanggal 21 Juni 1966, majelis yang sudah “dibersihkan” itu menyetujui dan memperkuat Surat Perintah 11 Maret menjadi Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Sehingga dengan adanya ketetapan itu presiden Soekarno tidak dapat menarik kembali *Supersemar*.

Legitimasi baru itu menempatkan Soeharto pada posisi yang kuat sehingga tanggal 25 Juli 1966 bersama dengan Soekarno menyusun Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) dimana dalam susunan kabinet itu Soekarno duduk sebagai Presiden sedangkan Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet. Dalam komposisi kabinet baru itu tentu saja peranan Soeharto sangat besar seperti yang dipaparkan Ulf Sundhaessen, kabinet baru terdiri dari sebuah Presidium yang beranggotakan lima orang menteri utama di dalam kabinet duduk 12 anggota ABRI, 6 di antaranya dari Angkatan Darat. Sebanyak 84 jabatan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal, 32 dipegang oleh ABRI sehingga secara *de facto*, Soeharto bertindak sebagai Perdana Menteri (Sundhaessen, 1968:417).

Hal ini menyebabkan dualisme kepemimpinan sehingga tanggal 7 Pebruari 1967 mengirim surat kepada Ketua Presidium Kabinet agar diadakannya pembagian tugas yang jelas. Namun surat itu ditolak oleh Soeharto sehingga tanggal 22 Pebruari 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Jenderal Soeharto selaku pemegang kekuasaan Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 dan tanggal 12 Maret 1967 Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden. Selanjutnya pada bulan Maret 1968 dilakukan Sidang Umum MPR Ke-V, Salah satu ketetapan yang dihasilkan adalah Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968 pada 27 Maret 1968 yang pengukuhan Soeharto sebagai Presiden.

KESIMPULAN

Kemelut politik pada tahun 1959 memberikan peluang kepada Soekarno untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Dalam demokrasi Terpimpin ada tiga kekuatan yang bersaing: Soekarno, PKI dan Angkatan Darat

(AD). Soekarno merangkul PKI untuk mengimbangi kekuasaan AD, sehingga hubungan antara Soekarno dengan PKI bersifat simbiosis. Titik nadir persaingan ini dengan dilancarkannya Gerakan 30 September 1965. Gerakan tersebut memberikan peluang kepada Soeharto dan Angkatan Darat untuk menghancurkan lawan-lawannya dalam Demokrasi Terpimpin.

Soeharto menghancurkan pilar-pilar kekuasaan Soekarno setelah mendapatkan Surat Perintah Sebelas Maret (*Supersemar*). Pilar-pilar kekuasaan Soekarno terdiri dari: (1) PKI yang dalam MPRS mengangkatnya sebagai presiden seumur hidup; (2) Manteri dalam Kabinet Dwikora yang terdiri dari 15 orang yang dipandang Sukarnois dan terlibat dalam Gerakan 30 September 1965; (3) Tentara, dimana Soeharto melaksanakan serangkaian pembersihan dan alih tugas di ke empat angkatan; (4) Pembersihan anggota MPRS/DPR-GR dengan memecat 36 orang anggotanya dari Partai Komunis Indonesia dan menggantikan dengan anggota baru yang ditunjuk Soeharto.

Rangkaian pembersihan itu telah menghancurkan pilar-pilar kekuasaan Soekarno, sebaliknya mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roslan, 1961, Penjelasan Manipol-Usdek, *Bahan-bahan Indoktrinasi*, A. Reachim. Djember: Penerbit Sumber Ilmu.
- Abdurrahman, Dudung, 2007, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Crouch, Harold, 1986, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Elson, R.E. 2001, *Soeharto, sebuah Biografi Politik*, Jakarta: Pustaka Minda Utama.
- _____, 2009, *Soeharto, sebuah Biografi Politik*, Jakarta: Pustaka Minda Utama.
- Fic M, Fictor, 2005, *Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Studi tentang Konspirasi*, Jakarta: Obor.
- Gootschalk, 1985, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Hidayat, Iman, 2009, *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara Press.

- Joeniarto, 1990, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasenda, Peter, 1991, *Sarwo Edhie Wibowo dan Operasi Militer: Penghancuran Gestapu/dan Pendobrak Orde Lama*, Jakarta: Prisma.
- Komando Operasi Tertinggi, 1965, *Tjataan Kronologis di Sekitar Peristiwa G30S*, Keputusan No. 1 tentang Susunan Dewan Revolusi Indonesia, Jakarta: Seksi Penerangan.
- Maran, Rafael Raga, 2001, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Mint, Jeanne S. 2002, *Marx, Marhaen, akar Sosialisme di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Na'imah, Hayatun, 2015, *Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Khazanah, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No.1, Juni 2015.
- Notosusanto, Nugroho, 1995, *Angkatan Bersenjata dalam Percaturan Politik Indonesia. Dalam Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. Pilihan Artikel Prisma*, Jakarta: LP3ES.
- Ramadhan, Gandhi, 2014, *Peranan Sarwo Edhie Wibowo dalam Penumpasan Gerakan 30 September 1965 di Jakarta dan Jawa Tengah*, Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ricklefs, MC, 2008, *Sejarah Indonesia Modern*, Jakarta: Serambi.
- Sekneg. Republik Indonesia, 1994, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*: Jakarta.
- Sholehuddin, Abi, 2015, "Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965", AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 3, No 1, Maret 2015, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.
- Soekarno, 2001, *Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato Soekarno)*, dihimpun oleh Wawan Tunggul Alam, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerojo, Soegiarso, 1988, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30S-PKI dan Peran Bung Karno*, cet ke 4, Jakarta: Intermedia.
- Subroto, Hendro, 2009, *Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*, Jakarta: Kompas.
- Sularto, St., 2001, *Dialog dengan Sejarah; Soekarno Seratus Tahun*, Jakarta: Buku Kompas.
- Sunarso, 2012, *Perkembangan Politik Pendidikan di Indonesia (Kajian Era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi)*, Laporan Penelitian, Jurusan PKnH FIS Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sundhaeusson, Ulf, 1986, *Politik Militer Indonesia 1945-1947*, Jakarta: LP3ES.
- Wanandi, Sofyan, 2014, *Menyibak Tabir Orde Baru, memoar politik Indonesia 1965-1998*, Jakarta: Buku Kompas.
- Wardaya, Baskara. T. 2006, *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G30S*. Yogyakarta: Galangpress.